

BAB IX

POWER POLITICS DALAM ORGANISASI INTERNASIONAL

- ➔ Apakah Organisasi internasional yang dibentuk oleh para pembentuknya akan selalu melakukan apa yang diinginkan oleh para pembentuknya?
- ➔ Sering terjadi kontradiksi (pertentangan) antara apa yang diinginkan oleh anggotanya dengan apa yang dilakukan oleh organisasi internasional tersebut.

Contoh:

PBB → Sering menyelesaikan persoalan konflik dengan cara membentuk pasukan Peace Keeping Operations (PKO), namun pada operasionalnya PKO sering tidak berfungsi apa-apa karena keputusan akhir ada ditangan negara anggota yang memiliki power.

- ➔ Maka munculah persoalan **power-politics** dari organisasi internasional.

Hal-hal yang berkaitan dalam aktivitas Organisasi Internasional:

1. **Rules** (peraturan)

Organisasi internasional memiliki peraturan-peraturan yang mengelola aktivitas para anggotanya dan hubungan dengan organisasi yang lain.

2. **Objectives** (tujuan)

Prilaku negara dalam organisasi internasional tidak bisa dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapainya dan hal itu tercermin pada organisasi dimana negara tersebut menjadi anggotanya.

3. **Structures** (struktur)

Struktur dalam organisasi mengatur hirarki kekuasaan untuk mekanisme pengambilan keputusan.

➔ Mengapa Organisasi Internasional sering menjalankan perilaku yang bertolak belakang dengan keinginan anggotanya?

Ada 2 (dua) konsep penting dalam melihat ini (baca: Organisasi Internasional) :

1. OTORITAS (sama dengan POWER)

Adalah sesuatu yang lahir karena kesediaan negara-negara anggotanya untuk meligitimasi power yang dimiliki oleh organisasi → melakukan apa yang perlu dilakukan. Pada posisi ini kemudian kedaulatan negara sering diabaikan.

2. OTONOMI (sama dengan AUTHORITY)

organisasi internasional memiliki otonomi kerana adanya legalitas yg diberikan oleh anggotanya, sehingga bisa bertindak secara independen.

STABILITAS organisasi internasional sangat bergantung pada 4 (empat) faktor :

1. Kohesivitas dari organisasi internasional
2. Solideritas dari organisasi tersebut
3. Punya "posisi" yang sama tentang persoalan-persoalan yang dihadapi. (*Common sense* dan konsensus)
4. Adanya "*Weakness/kelemahan*" yg dimiliki oleh anggotanya, menjadi faktor memperkuat kerjasama diantara mereka.